

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia komputer sekarang ini semakin lama semakin canggih, pekerjaan disegala bidang telah dikendalikan oleh komputer. Dahulu tenaga manusia sangatlah berperan penting dalam dunia kerja, namun di zaman modern ini sudah digantikan dengan mesin yang dikendalikan oleh komputer yang tentunya untuk mempermudah pekerjaan. Penggunaan komputer tidak hanya digunakan untuk bidang pendidikan saja, disegala bidang termasuk diperkantoran, komputer mempunyai peranan penting dalam operasionalnya.

Dengan adanya sistem tata pemerintah yang baik atau good governance, pemerintahan perlu untuk mengembangkan teknologi informasi agar pemerintah dapat dengan mudah untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi secara tepat, cepat dan akurat. Maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik baik itu untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Oleh karena itu sistem informasi yang berkualitas dibutuhkan oleh perusahaan atau kantor agar sesuai dengan visi dan misinya. Salah satu fungsi organisasi dari Kantor wali nagari lagan hilir pungasan adalah bagian keuangan. Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan

diantaranya adalah pencatatan transaksi/ kejadian keuangan, input data keuangan, perhitungan, pengeluaran serta pembuatan laporan keuangan.

Selanjutnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka usaha mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan di dalam UUD 45. Bagian keuangan ini perlu didukung oleh suatu sistem yang baik, cepat dan akurat sehingga menghasilkan Informasi yang berkualitas.

Di dalam membangun sebuah perangkat lunak , terdapat banyak hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah faktor kualitas dan evaluasi perangkat lunak. Pengukuran dan evaluasi terhadap sebuah sistem informasi perlu dilakukan demi perbaikan sistem yang lebih baik lagi. Dalam sebuah referensi kualitas perangkat lunak adalah pemenuhan kebutuhan fungsionalitas dan kinerja yang didokumentasikan. Dalam membuat perangkat lunak yang memiliki performa yang baik maka dibutuhkan penggalan kebutuhan dari pengguna secara tepat. Untuk mengukur tingkat kualitas suatu perangkat lunak, Salah satu metode adalah pengujian berdasarkan teori kualitas McCall. McCall menemukan faktor-faktor atau kriteria yang dapat mempengaruhi suatu kualitas perangkat lunak. Jadi seorang pengembang sistem dapat dikatakan membuat atau mengembangkan sistem dengan kualitas yang bagus dengan melihat performa atau terpenuhi tidaknya kebutuhan fungsionalitas software

tersebut berdasarkan kriteria yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak maka dapat disusun sebuah penelitian dengan judul Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor wali nagari lagan hilir punggasan Dengan Menggunakan Metode McCalls.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan suatu masalah maka penulis membuat suatu rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana merancang sistem informasi bisa membantu melakukan evaluasi kualitas sistem informasi pada Kantor wali nagari lagan hilir punggasan menggunakan metode McCalls?
2. Bagaimana sistem yang dilakukan bisa mengelolah data pada evaluasi kualitas sistem?
3. Bagaimana sistem yang telah ada bisa membatu dalam pengelolaan data dan meningkatkan kualitas sistem?

## **1.3 Hipotesa**

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif, dapaun hipotesanya seperti berikut :

1. Diharapkan dengan evaluasi kualitas sistem menggunakan metode Mcalls dapat meningkatkan kinerja dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Kantor wali nagari lagan hilir punggasan

2. Diharapkan dengan evaluasi kualitas menggunakan metode Mccalls dapat memperoleh gambaran kinerja sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Kantor wali nagari lagan hilir punggasan
3. Diharapkan dapat memperoleh gambaran tingkat efektifitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Kantor wali nagari lagan hilir punggasan

#### **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan, adapun batasan masalah yaitu, Metode pengujian yang digunakan McCall, Data yang digunakan dalam analisa dan pembahasan masalah adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner, Objek penelitian adalah Kantor wali nagari lagan hilir punggasan, Faktor kualitas McCall yang diuji pada penelitian ini adalah Correcness, Efficiency, Integrity, Usability dan Realiability

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian, adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Mengevaluasi pengelolaan teknologi informasi yang sedang berjalan pada Kantor wali nagari lagan hilir punggasan

2. Melakukan evaluasi terhadap metode Mccalls dalam meningkatkan kematangan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada wali nagari lagan hilir punggasan
3. Dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem yang ada pada Kantor wali nagari lagan hilir punggasan
4. Untuk mengetahui sudah efektif dan sesuai kebutuhan tidak sistem yang sedang di pakai

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas, melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap masalah yang lebih kritis.

2. Bagi Subjek Penelitian Kantor wali nagari lagan hilir punggasan

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan pengelolaan keuangan daerah agar bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi kedepannya.

3. Bagi pihak lain Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan memahami konsep metode Mccalls

## 1.7 Tinjauan Umum Kantor Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan

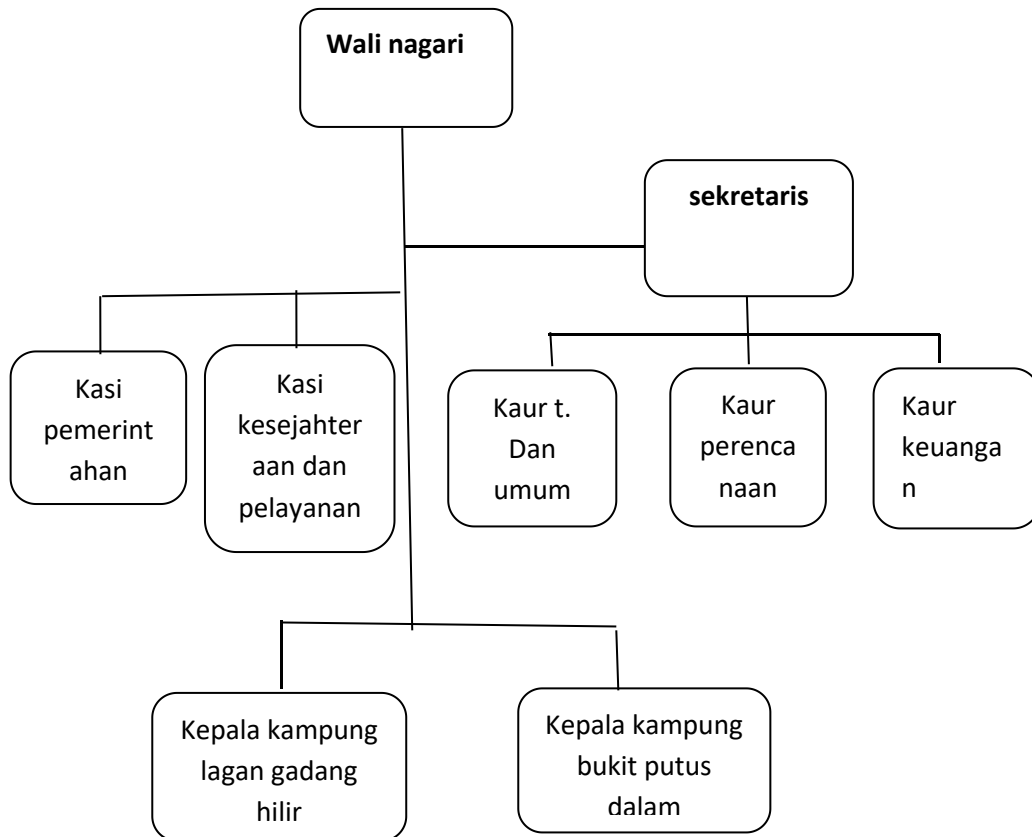
Nagari lagan hilir Punggasan adalah salah satu Nagari dalam Kecamatan Perwakilan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Penduduk sebanyak 8.662 jiwa, Luas 14.550 Ha, Luas sawah 1.100 Ha, hasil tiap-tiap tahun 15.200 kelebihan dari makan 96.082, hari pasarnya hari Senin. Hasil Pertanian Nagari Punggasan adalah padi, cengkeh, karet, cabe biasa, kelapa. Menurut keadaan tanggal 17 Agustus 1940 batas Nagari itu sesuai dengan batas Nagari semasa sebelum perang semasa berkepala Nagari Nagari Punggasan.

### 1.7.1 Sejarah Kantor Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan

Ribuan tahun silam dari Sungai Pagu ada seorang yang bernama Pak Laba pekerjaan mencari manisan dan lilin laba serta mamikek buruang ke nagari Punggasan sekarang yang diwaktu itu belum bernama Punggasan cuma terdiri dari rimbo rayo. Pak Laba sewaktu mencari manisan dan lilin laba dari kayu arang turun ke Lagan mereka mencari tempat bermalam yaitu kasabatang **Kayu Lagan** yang kecil yaitu **Lagan Kecil**. Setelah dari **Lagan Kaciak** itu mereka pindah ke **Lagan Gadang** juga berasal dari kayu Lagan yang gadang atau besar. Dari Lagan Gadang mereka menuju arah kebarat dan bermalam pula dibawah **Pohon Tandikat** dan pada hari berikutnya bermalam pula **Pohon Ambacang**, kini semua tempat itulah menjadi Kampung. *Bukit sikai, kayu arang, Lagan ketek, Lagan Gadang, Tandikek dan Ambacang*. Selesai melakukan pemeriksaan dan

peninjauan yang tersebut diatas rombongan itu kembali ke Sungai Pagu menjemput kaumnya untuk membuat Taratak pada tempat yang telah ditinjaunya itu dalam perjalanan ini. Untuk menyampaikan maksudnya yang tersebut, sesampainya mereka di Bukik Sikai mereka menurun arah kekiri ke Kampung Akat sekarang. Asal namanya dari mufakat yaitu tempat membuat mufakat. Nama Nagari yang bakal dijadikan itu adalah tempat Paunggasan maka dinamakan Nagari yang bekal diperbuat itu Punggasan yang asal katanya dari Pa-unggasan tempat “*mamikek buruang*” dari **Kampung Akat** mereka mengatur membuat lading, Taratak dari Lagan Ketek ke Lagan Gadang dan seluruh Kampung-kampung yang ada sekarang seperti Tandikek, Ambacang, Koto Panjang dan lain-lainnya. Timbulnya atau terjadinya Penghulu-penghulu dalam Nagari Punggasan selesai dia rombongan yang datangnya dari Sungai Pagu.

### 1.7.2 struktur organisasi kantor wali nagari lagan hilir punggasan



*Sumber : struktur organisasi kantor wali nagari lagan hilir punggasan*

**Gambar 1.1 struktur organisasi kantor wali nagari lagan hilir punggasan**

### 1.7.3 tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diuraikan tugas – tugas dari beberapa bagian dari kantor wali nagari lagan hilir punggasan

#### 1. Wali nagari

Wali nagari adalah sebuah jabatan politik untuk memimpin sebuah nagari di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Jabatan wali nagari ini setara dengan kepala desa, perbedaannya hanya pada penamaannya saja



Sebelumnya jabatan wali nagari ini masih asing dalam struktur pemerintahan nagari di masyarakat Minangkabau. Kemudian setelah dikeluarkannya tentang ordonansi nagari pada tahun 1914 oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana para penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama, diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan ini dapat diterima dan menjadi tradisi adat di mana jabatan ini juga diwariskan kepada keponakan pemegang jabatan sebelumnya. Selain itu efek dari aturan ini juga membatasi anggota kerapatan nagari, yang hanya pada penghulu yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda saja. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur.

Setelah kemerdekaan Indonesia, di mana dengan dikeluarkannya undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan kemudian Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, jabatan wali nagari ini turut dihapus dan diseragamkan dengan jabatan kepala desa.

Kemudian pengaruh dari reformasi pemerintahan di Indonesia, dan wacana akan otonomi daerah, maka keluarlah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979. Pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No 22 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama, disahkanlah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan undang undang UU No 22 Tahun 1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

## 2. Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan manajemen tata praja dalam pemerintahan desa. Ia juga memiliki tugas menyusun rancangan regulasi desa serta mengurus pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa, serta kependudukan.

## 3. Kasi kesejahteraan dan pelayanan

Kepala seksi Pelayanan dan kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan dan kesejahteraan. Kepala seksi Pelayanan dan kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pelayanan dan kesejahteraan

## 4. Sekretaris

Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten/mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang

tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi/langsung dari atasannya

2. Kaur t.u dan umum

Kaur Umum dan Tata Usaha adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan ketatausahaan. Dalam pengelolaan keuangan Desa, Kaur TU dan Umum bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

3. Kaur Perencanaan

Melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan, serta menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan desa juga menjadi tugas dari Kepala Urusan Perencanaan

4. Kaur keuangan

Kepala urusan keuangan atau biasa disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan desa. ... Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa.

5. Kepala desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.[1] Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.